

BAB III

LATAR BELAKANG KERJASAMA BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN DI BIDANG KESEHATAN

3.1 Kerjasama Bilateral Indonesia Dan Korea Selatan Sebelum Pandemi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi internasional, dan bangsa-bangsa lain semuanya telah mengakui Indonesia sebagai bangsa yang berbentuk Republik. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika Indonesia mengembangkan hubungan diplomatik dengan negara lain. Para pihak dalam hal ini dapat berupa negara lain, organisasi internasional, atau badan hukum lain selain atau bukan negara. Tentunya Korea Selatan tidak luput dari pandangan Indonesia, Lebih dari 52 tahun telah berlalu sejak Indonesia dan Korea Selatan pertama kali menjalin hubungan diplomatik. khususnya mulai tahun 1968. Namun, hubungan diplomatik formal Indonesia dan Korea Selatan terjalin pada tanggal 17 Desember 1973. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, sehingga Indonesia memberikan sumber daya sekaligus sumber tenaga kerja, sedangkan Korea Selatan menyediakan uang tunai, investasi, dan teknologi. Beginilah hubungan kerja sama dimulai. karena kontak kedua negara berkembang pesat di berbagai bidang, termasuk investasi dan kolaborasi teknologi serta bidang lain termasuk kesehatan, pendidikan, dan militer (Triwibowo and Martha, 2021a).

Sebagai negara maju, Korea Selatan mendapatkan banyak keuntungan dengan menjalin kerjasama bilateral dengan Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi peningkatan dalam kerjasama ini. Meski di tengah pandemi, hubungan Indonesia dan Korea Selatan sejauh ini relatif baik. Banyak bisnis Korea Selatan telah berinvestasi di dalam dan di sekitar Indonesia. Tidak hanya kerjasama dalam ekonomi saja yang maju, sektor lain juga mengalami perubahan signifikan contohnya sektor dalam budaya, salah satunya adalah banyaknya musisi Korea Selatan yang tampil sebagai tamu pada acara musik atau budaya di Indonesia mengingat banyak masyarakat Indonesia yang merupakan pengagum band dan artis asal Negeri Gingseng tersebut (Muchsya, 2020).

Pendapat dari Yang Seung-yoon menyampaikan tentang awal kontak konsuler Indonesia dan Korea Selatan pada tahun 1966 hingga awal tahun 1970-an, keduanya tidak terlalu dekat. Ini didasarkan pada lingkungan internasional era perang dingin yang berlaku saat itu. Indonesia sendiri memutuskan untuk tidak condong ke blok lain dan mendirikan Gerakan Non-Blok (GNB), tetapi Korea Selatan pada saat itu terlalu condong ke Blok Barat sebagai akibat dari keputusan negara tersebut untuk bergabung dengan aliansi Amerika Serikat. Namun, terjadi peningkatan besar dalam hubungan kedua negara dari tahun 1980 hingga 1990. Pertumbuhan ini terlihat di sejumlah sektor, termasuk sektor politik, sosial budaya, dan ekonomi. Kehadiran berbagai bentuk kontak dan pertukaran merupakan indikator lain seberapa baik kemajuan hubungan kedua pihak. Dimulai pada tahun 1970 dan berlanjut hingga tahun 2006, hubungan Korea Selatan dan Indonesia tersebut diikat oleh beberapa perjanjian kerjasama (Sulistiyono *et al.*, 2021).

Setelah menjalin hubungan diplomatik, kedua negara terus memperdalam hubungan mereka dengan meningkatkan pertukaran kunjungan timbal balik (*high dignitaries*). Semangat ini bermula ketika Abdurrahman Wahid, mantan presiden Indonesia, melakukan kunjungan resmi ke Korea Selatan pada tahun 2000. Setelah itu, banyak perwakilan pemerintah tingkat tinggi, termasuk presiden dan tingkat menteri, melakukan kunjungan. Kunjungan kenegaraan terakhir presiden kedua negara dilakukan masing-masing pada November 2017 dan September 2019, ketika Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengunjungi Indonesia dan Presiden Indonesia Joko Widodo mengunjungi Korea (Setiawan, Fatimah and Alfarobi, 2023).

Deklarasi Bersama tentang Kemitraan Strategis untuk Meningkatkan Persahabatan dan Kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Korea ditandatangani oleh Korea Selatan dan Indonesia pada tahun 2006. Hubungan kedua negara tersebut sekarang dikenal sebagai *Strategic Partnership*. Tiga pilar utama kerjasama antara kedua negara diuraikan dalam deklarasi ini, antara lain: kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi; kerjasama politik dan keamanan; dan kerjasama sosial budaya (Muchsya, 2020). Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, babak baru dalam hubungan Korea Selatan dan Indonesia dimulai saat itu. Sejak 2006 dengan adanya *Strategic Partnership*, telah terjadi peningkatan manfaat ekonomi yang dibawa oleh ekspor dan

investasi asing. Pada tahun 1977, Indonesia mengekspor barang senilai sekitar US\$345 juta ke Korea Selatan, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2012 Indonesia mengekspor barang senilai lebih dari \$15,7 miliar jumlah ini terus meningkat dari waktu ke waktu. Investasi asing di Indonesia juga meningkat, Memang terjadi pasang surut jumlah investor Korea Selatan yang masuk ke Indonesia tetapi tetap memberikan dampak positif untuk ekonomi Indonesia (Tanjung, 2021).

Pada 8 November hingga 10 November 2017, Indonesia menerima kunjungan kenegaraan dari Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Undangan kenegaraan tersebut diberikan oleh presiden Indonesia Joko Widodo, Dengan kedatangan tersebut, Presiden Moon mengunjungi Indonesia, status hubungan diplomatik kedua negara semakin membaik akibat pertemuan tersebut. Selain menerima undangan Presiden Joko Widodo, perjalanan Presiden Moon ke Indonesia merupakan bagian dari rangkaian kunjungan resmi ke negara-negara ASEAN. Saat itu, Presiden Moon melakukan perjalanan ke sejumlah negara ASEAN, antara lain Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Perjalanan luar negeri pertama Presiden Moon adalah ke Indonesia. Presiden Moon menyampaikan sambutannya selama kunjungannya ke Indonesia, yang menyatakan niat Korea Selatan untuk menjalin hubungan positif dengan anggota ASEAN (Fitria and Khoirul, 2021). Sehingga pada 9 November 2017, Korea Selatan dan Indonesia mencapai kesepakatan untuk menandatangani perjanjian *Joint Vision Statement for Co-Prosperity and Peace*. Hubungan diplomatik kedua negara telah ditingkatkan menjadi *Special Strategic Partnership* dengan penandatanganan perjanjian bersama ini. Dalam perjanjian kali ini, terdapat empat hal yang dibahas adalah: kebijakan militer dan luar negeri; perdagangan bilateral dan pembangunan infrastruktur; *people-to-people exchanges*; dan kerjasama regional dan internasional. Dengan peningkatan kesepakatan tersebut, hubungan Korea Selatan dan Indonesia terus berkembang di segala bidang (Purbantina and Hapsari, 2020).

Terlepas dari hal itu, sektor Kesehatan juga tidak luput dari pandangan Indonesia dan Korea Selatan. Sebelum pandemi COVID-19, Indonesia telah menjalin beberapa Kerjasama dengan Korea Selatan seperti peningkatan pengetahuan dibidang kesehatan melalui pelatihan kerja. Di saat yang sama yaitu pada 9 November 2017, setelah menandatangani perjanjian *Joint Vision Statement for Co-Prosperity and Peace*

Indonesia dan Korea Selatan membahas Perjanjian Kerjasama Kesehatan (PKS) yang kemudian disusul penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU) Joint Working Group on Health*. Secara umum perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di bidang kesehatan antara kedua negara dan memperkuat hubungan bilateral di sektor tersebut (Putri Anggina, 2022). Tujuan utama dari MoU ini secara spesifik sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara kedua negara dalam bidang kesehatan.
- b. Memfasilitasi pertukaran tenaga medis dan keahlian kesehatan antara Indonesia dan Korea Selatan.
- c. Membantu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di kedua negara.
- d. Menggalakkan penelitian dan pengembangan bersama dalam bidang kesehatan.
- e. Memperkuat kapasitas tanggap darurat kesehatan untuk menghadapi situasi krisis atau bencana alam.

Penandatanganan MoU antara Indonesia dan Korea Selatan tentang *Joint Working Group on Health* didasari oleh kesadaran akan pentingnya kerjasama internasional dalam bidang kesehatan. Kesehatan adalah isu global yang mempengaruhi setiap negara dan kerjasama lintas batas menjadi penting untuk menghadapi tantangan kesehatan bersama seperti penyebaran penyakit menular, peningkatan jumlah penyakit kronis, krisis kesehatan, dan masalah kesehatan masyarakat lainnya (Putri Anggina, 2022). Dalam kesepakatan tersebut kedua negara sepakat untuk bekerjasama dalam berbagai bidang kesehatan, seperti:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan, termasuk melalui pelatihan dan pertukaran tenaga medis.
- b. Pertukaran informasi dan pengetahuan tentang penyakit menular dan non-menular, serta pengalaman dalam menghadapinya.
- c. Kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan ilmu kesehatan untuk meningkatkan diagnosa, pengobatan, dan pencegahan penyakit.
- d. Pengembangan dan implementasi program kesehatan bersama, terutama dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat khususnya yang bersifat global.

- e. Peningkatan kerjasama dalam menghadapi situasi darurat kesehatan, termasuk bencana alam, wabah penyakit, dan pandemi.

Penandatanganan MoU *Joint Working Group on Health* antara Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan komitmen keduanya dalam memperkuat kerjasama lintas batas untuk meningkatkan sektor kesehatan di kedua negara. Dengan bekerjasama, diharapkan dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam upaya mewujudkan sistem kesehatan yang lebih baik dan berkelanjutan (Pambudi, 2021). Baik Indonesia maupun Korea Selatan diharapkan meraih beberapa manfaat dari perjanjian MoU tersebut, di antaranya:

- a. Penyediaan akses keahlian dan teknologi kesehatan dari masing-masing negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
- b. Peningkatan pengetahuan dan kapasitas sumber daya manusia di sektor kesehatan melalui pertukaran ilmu pengetahuan dan pelatihan.
- c. Percepatan inovasi dalam bidang kesehatan melalui penelitian dan pengembangan bersama.
- d. Meningkatkan persahabatan dan hubungan antarbangsa antara kedua negara.
- e. Meningkatkan kemampuan bersama dalam menghadapi masalah kesehatan global yang kompleks.

3.2 Kerjasama Bilateral Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19.

Epidemi telah mengubah cara diplomasi dilakukan, terutama untuk negara-negara kecil dan menengah. Karena status marginal mereka di arena politik internasional, negara-negara kecil dan menengah umumnya terlihat lebih rentan dalam manajemen krisis. Akibatnya, diplomasi negara-negara kecil dan menengah biasanya lebih responsif untuk memfasilitasi komunikasi ketika menghadapi keadaan darurat (Rachmawati, 2016). Secara global, penurunan ekonomi utama sebagai efek COVID-19 telah terlihat sebagai akibat dari penurunan produktivitas, kematian, penutupan bisnis, gangguan perdagangan, dan runtuhnya sektor pariwisata. Hal ini menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan di seluruh dunia, termasuk di Amerika Latin dan Karibia, efek ekonomi juga dirasakan di

kawasan lain, terutama yang bergantung pada hubungan manusia, seperti Asia Tenggara dan Eropa. Karena pembatasan pertemuan diplomatik tatap muka, sejumlah pertemuan internasional harus ditunda atau diubah ke format digital untuk kepentingan diplomasi. Ketika pertanyaan tentang sumber virus Covid-19 mengarah ke negara tertentu, diplomasi pun menemukan dirinya dalam situasi yang menantang. Dalam situasi ini, diplomasi menghadapi sejumlah kesulitan yang jarang datang sekaligus (Goma, 2021).

Tahun 2020 bahkan dianggap oleh Indonesia sendiri sebagai tahun yang paling sulit bagi diplomasi Indonesia, antara lain karena meningkatnya persaingan dan ketidakpastian. Pandemi COVID-19 menghadirkan permasalahan bagi Indonesia di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan sektor kesehatan. Indonesia dinilai masih belum mampu melakukan pemeriksaan tes sesuai dengan standar dasar yang ditetapkan WHO di bidang kesehatan. Minimnya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai menjadi salah satu faktor rendahnya jumlah pemeriksaan. Indonesia juga dinilai kurang ideal dalam upaya pelacakan kontak selain rendahnya jumlah tes. Dengan fasilitas dan peralatan medis yang dirasa kurang memadai untuk menangani pandemi, kondisi sistem kesehatan Indonesia semakin memprihatinkan. Bahkan di antara negara dengan populasi tertinggi di dunia, Indonesia termasuk negara yang belum untuk memproduksi vaksin secara mandiri (Shira, 2021). Masuknya pandemi, dari sisi ekonomi, menyebabkan ekonomi Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan hingga hanya 2,5%, dengan asumsi tidak mencapai skenario terburuk, yaitu 0%. Selain itu, kemiskinan merupakan masalah di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan turun menjadi negatif 5,32% dan 3,49%. Selain itu, pandemi telah menyebabkan peningkatan jumlah orang miskin baru sebesar 8,5 juta orang dan peningkatan jumlah pengangguran sebesar 2,56 juta orang (Supardan, 2016).

Diplomasi Indonesia berkonsentrasi pada sejumlah inisiatif untuk mengatasi masalah yang terjadi, antara lain diplomasi ekonomi, penyelamatan warga negara, dan kegiatan kerjasama kesehatan. Salah satu dampak pandemi yang paling signifikan adalah pada sektor kesehatan dan ekonomi, yang memaksa pemerintah Indonesia mengubah pendekatannya terhadap diplomasi kesehatan dan ekonomi. Untuk meningkatkan kinerja ekspor-impor dan menahan dampak finansial dari pandemi COVID-19, Indonesia juga

berkonsentrasi pada upaya penyelamatan orang-orang yang berada di luar negeri dan upaya kerjasama di bidang kesehatan, khususnya terkait pencarian bersama vaksinasi, dalam hal keselamatan dan kesehatan warga negara. Pendapat Setiawan, Affianty and Tanjung, (2022) menyatakan bahwa pemerintah Indonesia berupaya untuk berkonsentrasi pada inisiatif diplomasi kesehatan, khususnya upaya untuk mendorong kemandirian dan kesehatan bangsa. Paling umum, diplomasi vaksinasi bilateral dan multilateral digunakan untuk mencapai hal ini. Publikasi-publikasi ini menampilkan kebijakan luar negeri Indonesia yang berorientasi ke dalam dan berfokus pada rumah dalam bentuknya yang sekarang. Menurut Hidayat, Anam and Munir, (2022), Indonesia dapat menggunakan diplomasi publik untuk mengatasi krisis yang disebabkan oleh Covid-19, terutama dalam hal menumbuhkan persepsi yang baik tentang bangsa.

Indonesia terlibat dalam diplomasi ini sebagai bagian dari janjinya untuk mempromosikan kerjasama internasional dalam memerangi pandemi. Selain sebagai penyalur aspirasi Indonesia akan pentingnya perlindungan warga negara, ketahanan sistem kesehatan nasional dan pemulihan ekonomi, aspirasi terkait kemanusiaan dalam upaya mewujudkan norma global, dan aspirasi terkait pencapaian kesepakatan internasional, dorongan kerja sama multilateral untuk menghadapi pandemi dilakukan sebagai bagian dari “kewarganegaraan internasional yang baik”. Hal itu antara lain ditunjukkan melalui aksi-aksi pengamanan warga negara, diplomasi vaksin, kampanye solidaritas global, bahkan kerjasama ekonomi dalam kerangka multilateral terkait upaya penanggulangan pandemi (Thaha, 2020). Selain negara-negara berpenghasilan menengah lainnya, sekutu tradisional dan negara-negara yang lebih maju juga terlibat dalam upaya membentuk aliansi.

Menurut Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, diplomasi Indonesia harus proaktif, adaptif, dan cepat tanggap terhadap permasalahan yang muncul. Upaya diplomasi Indonesia sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang merupakan prinsip yang benar untuk selalu dijunjung tinggi oleh Indonesia. Konsep aktif yang menurutnya Indonesia terlibat dalam politik internasional dan upaya membantu penyelesaian isu-isu global, dalam hal ini didukung oleh keikutsertaan Indonesia dalam sistem multilateral. Di sisi lain, upaya Indonesia untuk meningkatkan hubungan dengan

semua pihak dalam upaya penanggulangan Covid-19 merupakan prinsip bebas (Maimunah, 2020).

Kementerian Luar Negeri pemerintah Indonesia terus melakukan diplomasi atas nama kepentingan Indonesia di dalam dan luar negeri. Namun demikian, perubahan dilakukan sebagai akibat dari epidemi COVID-19. Dalam hal ini, penanggulangan pandemi menjadi prioritas diplomasi utama Indonesia. Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi sedang, Indonesia ingin melakukan hubungan diplomasi dengan mengutamakan upaya penanggulangan wabah global. Tiga tema utama upaya diplomasi multilateral Indonesia meliputi inisiatif yang berkaitan dengan perlindungan warga negara, solidaritas internasional, dan kerja sama ekonomi. Ketiga tugas ini diselesaikan untuk membantu penanganan pandemi COVID-19. Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam sistem multilateral, khususnya terkait dengan ketiga hal tersebut, akan menjadi pokok bahasan utama bagian ini (Livana *et al.*, 2020).

Pemerintah Indonesia menggunakan diplomasi vaksin untuk melakukan upaya diplomasi yang ditujukan untuk melindungi penduduknya. Upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan ketersediaan dan pasokan vaksinasi bagi Indonesia melalui kerja sama bilateral dan multilateral dapat disimpulkan sebagai diplomasi vaksin. Indonesia melakukan diplomasi vaksin karena tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan vaksin sendiri sehingga membutuhkan bantuan dan kerjasama dari negara lain untuk dapat memproduksi vaksin. Untuk mendapatkan vaksin, Indonesia mencari kerjasama bilateral dengan China, Uni Emirat Arab, Inggris, serta Korea Selatan, dan sejumlah negara lain. Sejak pertengahan tahun 2020, perusahaan Sinovac telah bekerja

sama dengan pemerintah China dalam penelitian vaksin. Sementara itu, Sinopharm dan G24 berkolaborasi untuk melakukan bisnis dengan Uni Emirat Arab. Untuk mengamankan vaksinasi AstraZeneca, Indonesia kerjasama dengan Korea Selatan. Melalui kerjasama bilateral antara Indonesia dan beberapa negara tersebut, pada tahun 2020 Indonesia memperoleh tiga juta dosis vaksin. Saat ini telah lebih dari 75 juta dosis vaksin dari Sinovac, Astrazeneca, dan Sinopharm telah dikirim ke Indonesia sebagai hasil diplomasi bilateral tersebut (Yunanda, 2020a).

Pemerintah Indonesia juga melakukan kegiatan kerjasama multilateral untuk memastikan akses Indonesia terhadap pasokan vaksin yang cukup. Dalam kaitan ini, Kementerian Luar Negeri aktif dalam *Coalition for Epidemic Preparedness Innovations* (CEPI) dan berniat untuk bergabung dalam program *GAVI COVAX Facility*. Aliansi *Global Alliance for Vaccines and Immunization* (GAVI) telah menciptakan mekanisme GAVI COVAX sebagai sarana pengadaan vaksin untuk mendukung pemerataan vaksin, yang menurunkan angka kematian, menjaga sistem kesehatan, dan mempertahankan layanan vital. Vaksinasi yang ditawarkan melalui pendekatan ini gratis. Kerjasama GAVI COVAX, CEPI, berbeda dengan kerjasama bilateral lainnya, mekanisme kerjasama multilateral ini, dalam pengembangan vaksin yang memungkinkan akses terhadap data dan keahlian terkini dalam penelitian dan pengembangan vaksin. Selain itu, Indonesia menggunakan Pertemuan Tingkat Menteri *Alliance for Multilateralism* (AoM) untuk menyoroti nilai WHO sebagai wadah kerjasama internasional dan kerjasama multilateral untuk menjamin ketersediaan pasokan medis, alat pertahanan diri, dan vaksin yang diperlukan. Melalui forum *International Coordination Group on COVID-19*, keterlibatan aktif Indonesia dalam mendorong tersedianya vaksinasi yang efisien, murah, dan dapat diakses oleh negara berkembang juga dikomunikasikan (Margono, Irawan, Graciella, Calista, *et al.*, 2021).

Upaya diplomasi Indonesia untuk memerangi wabah COVID-19 merambah ke dunia usaha. Selain sektor kesehatan, ekonomi merupakan bidang utama yang menjadi fokus pemerintah Indonesia dalam memerangi COVID-19, terutama mengingat dampak ekonomi negatif pandemi. Sebelum pandemi, ada fokus pada kerja sama ekonomi, dan fokus ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Hal ini disebabkan dampak serius pandemi terhadap perekonomian Indonesia. *Refocusing* tujuan diplomasi Indonesia dilakukan untuk membantu upaya penanggulangan wabah tersebut, salah satunya terkait dampak sosial ekonomi, sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Pers Tahunan 2021. Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah inisiatif diplomasi ekonomi pada tahun 2020 (Eka Putri, Kurniawati and Apriadi, 2021). Diplomasi ekonomi mencakup kesepakatan yang mendorong di tingkat ASEAN yang membahas pemulihan ekonomi regional serta kerja sama ekonomi multilateral dan bilateral. Juga fokus pada upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, seperti kerja sama *Travel Corridor Agreement*

(TCA). Indonesia bekerja sama dengan TCA untuk memulai kembali hubungan komersial yang terhenti karena pandemi. TCA dirancang untuk mempertahankan operasi ekonomi dan perusahaan sambil mengikuti tindakan pencegahan kesehatan yang tepat. Dengan Korea Selatan, China, Singapura, Uni Emirat Arab, dan Indonesia, perjanjian TCA telah berhasil dinegosiasikan. Selain itu, diadakan diskusi mengenai TCA dengan Jepang dan ASEAN. Diplomasi ekonomi Indonesia di tingkat ASEAN dipusatkan pada upaya mencapai kesepakatan *ASEAN Comprehensive Recovery Framework*. Selain itu, kerja sama ASEAN dengan mitra-mitra ASEAN juga dilakukan dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, seperti dalam forum ASEAN+3 dan *East Asian Summit*. Indonesia juga mengupayakan kerjasama ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi secara bilateral dan dalam forum- forum multilateral. Secara bilateral, beberapa kerjasama pemulihan ekonomi dilakukan oleh Indonesia (Nalini, 2021).

Dengan memperhatikan fokus utama pembangunan kesehatan sebagaimana diarahkan dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra (rencana strategi) Kementerian Kesehatan 2020-2024, maka disusun arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan kerjasama internasional. Untuk mendukung komitmen internasional dalam pembangunan kesehatan di masa pandemi, khususnya pencapaian SDGs di bidang kesehatan, kerjasama luar negeri juga terus dibina. Namun dengan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan berpegang pada amanat Undang-Undang Hubungan Internasional dan Undang-Undang Perjanjian Internasional, perluasan kerjasama internasional juga memperhatikan politik luar negeri. Kebijakan kerjasama dengan Korea Selatan membuka jalan untuk membantu mencapai rencana strategi dan pencapaian SDGs di bidang kesehatan tersebut (Fahrika and Roy, 2020).

Kelemahan signifikan dalam pembangunan kesehatan masyarakat ditunjukkan oleh wabah pandemi Covid-19, baik di negara industri maupun negara berkembang. Karena peningkatan kasus yang tiba-tiba, beberapa fasilitas medis berjuang untuk memenuhi produksi, sistem informasi kewalahan, dan alat pelindung diri dasar seperti respirator, masker bedah, sarung tangan rumah sakit, pakaian pelindung, kacamata medis, dan penutup sepatu medis tidak tersedia. Sebelum COVID-19, Korea Selatan, pusat manufaktur global, memproduksi hampir 30% produk alat pelindung diri yang dijual di

pasar global. Kapasitas Korea Selatan untuk memproduksi dan mengeksport pasokan ini sangat penting bagi negara lain, terutama negara berkembang salah satunya Indonesia untuk memerangi pandemi dan potensi penyakit lainnya (Shira, 2021).

Setelah memperlambat penyebaran virus Corona sejak awal Maret 2020, Korea Selatan kini gencar melakukan diplomasi medis dengan berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk membantu memerangi pandemi COVID-19. Korea Selatan menjadi sorotan internasional untuk penanganan awal COVID-19. Sebagai hasil diplomasi kesehatan, Korea Selatan telah memberikan bantuan berupa masker dan alat pelindung diri (APD) kepada Indonesia. Sebagian besar outputnya juga dikirim ke negara-negara industri seperti AS, Italia, dan Jepang. Selain itu, Korea Selatan mengirimkan sekelompok spesialis medis ke negara-negara terbelakang. Negara-negara yang terjangkit COVID-19 telah mencatat kesiapan Korea Selatan untuk mengerahkan tim kesehatan untuk bertukar pengalaman, pelajaran, dan saran untuk mengatasinya (Anisa, Rusdinal and Firman, 2021).

Gagasan tentang perlunya vaksin COVID-19 untuk melawan virus tersebut, telah menjadi pemandangan yang sering terlihat secara internasional ketika pandemi merajalela, pada awal tahun 2020. Dan dalam pandangan itu, setidaknya dunia terbagi menjadi dua kategori negara: mereka yang menyediakan vaksin dan mereka yang menerima vaksin. Vaksin digunakan di negara penghasil tidak hanya sebagai alat untuk kebijakan luar negeri tetapi juga untuk bantuan kemanusiaan. Diplomasi merupakan upaya untuk meningkatkan akses vaksin di lembaga internasional dan negara yang memproduksinya untuk negara konsumen. Begitulah diplomasi vaksin antara Indonesia dan Korea Selatan terjalin, Memiliki dan mengembangkan vaksin dapat menghasilkan keuntungan politik dan ekonomi bagi suatu negara. Vaksin sering disebut-sebut sebagai salah satu alat untuk mencapai perdamaian. Vaksin juga merupakan alat untuk terjadinya kemitraan transnasional yang memelihara kesehatan global. Yang lain telah membahas vaksinasi dalam perspektif diplomasi sebagai soft power baik dalam konteks bantuan kemanusiaan dan kolaborasi maupun dalam konteks ekspansi dan memainkan peran dalam dominasi geopolitik. Namun, pemerintah Korea Selatan merasa kewajiban negara-negara yang mampu memproduksi vaksinasi tersebut untuk melakukan diplomasi vaksin guna

menghentikan penyebaran vaksin yang merenggut banyak korban. Dalam konteks Indonesia, partisipasi dalam forum internasional diperlukan untuk mendapatkan vaksin demi menjaga kesehatan masyarakat serta perlindungan kesehatan nasionalnya. Oleh karena itu, negara-negara seperti Indonesia melakukan kegiatan diplomasi untuk membuka jalur bilateral, multilateral, dan publik untuk akses pemasok vaksin (Sutari, Idris and Misnaniarti, 2022).

Pemenuhan vaksin dalam skala besar merupakan tantangan yang kompleks bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Tentunya terdapat beberapa tantangan diplomasi kesehatan yang dapat dihadapi selama pandemi dalam upaya memenuhi kebutuhan vaksin dan pendistribusinya kemasyarakat, sebagai berikut :

1. Akses ke Vaksin.

Dalam situasi pandemi global seperti COVID-19, permintaan vaksin sangat tinggi di seluruh dunia. Negara-negara dengan produksi vaksin yang lebih besar cenderung memprioritaskan kebutuhan domestiknya sendiri sebelum mengekspor ke negara lain. Untuk kasus Korea Selatan dan Indonesia, Korea Selatan tidak mampu menyediakan pasokan vaksin untuk Indonesia dalam jumlah banyak karena selain Indonesia Korea Selatan juga harus produsen vaksin untuk negara lain ditambah Korea Selatan juga harus menjaga pasokan vaksin untuk negeranya.

2. Persaingan Global

Pasar vaksin internasional dapat sangat kompetitif. Negara-negara dengan sumber daya lebih besar atau kemampuan untuk melakukan kesepakatan awal dengan produsen vaksin mungkin mendapatkan pasokan yang lebih besar daripada negara-negara dengan sumber daya terbatas. Hal ini dapat mempengaruhi negosiasi antara Indonesia dan Korea Selatan dengan produsen vaksin. Oleh sebab itu Indonesia melakukan diplomasi vaksin ke beberapa negara, sehingga vaksin untuk Indonesia tetap terpenuhi.

3. Isu Distribusi

Setelah mendapatkan pasokan vaksin, tantangan berikutnya adalah distribusinya secara merata ke seluruh populasi. Terdapat perbedaan geografis dan infrastruktur yang berbeda di dalam setiap negara, sehingga distribusi vaksin harus diatur dengan hati-hati agar dapat mencapai orang-orang yang membutuhkannya secara efisien.

4. Ketergantungan pada Negara Lain

Indonesia mungkin juga menghadapi tantangan ketika bergantung pada negara lain untuk memperoleh vaksin. Ini dapat membuat negara rentan terhadap perubahan dalam kebijakan ekspor atau kondisi politik di negara pemasok. Sehingga diharapkan kedepannya Indonesia dapat memproduksi vaksinnya sendiri, untuk mencegah ketergantungan.

5. Diplomasi dan Hubungan Internasional

Tantangan diplomasi kesehatan dapat muncul dari perbedaan kepentingan dan prioritas antara Indonesia dengan negara-negara lain. Negosiasi dengan produsen vaksin dan negara lain yang memproduksi vaksin dapat melibatkan perundingan yang rumit dan kompleks.

6. Kepercayaan Publik

Penerimaan vaksin oleh masyarakat sangat penting untuk mencapai kekebalan kelompok. Tantangan dalam diplomasi kesehatan adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin yang ditawarkan oleh negara mitra.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Indonesia melakukan diplomasi ke negara Korea Selatan dan negara-negara lainnya serta menyampaikan keluhan dalam forum internasional, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), untuk memastikan akses yang lebih baik ke vaksin bagi negara yang lebih rentan secara ekonomi. Diharapkan kerjasama bilateral antara kedua negara Indonesia dan Korea Selatan yang telah dilakukan terus berkembang dalam penelitian, pengembangan, dan produksi vaksin juga dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kemandirian vaksinasi di wilayah tersebut.

Sebagai produsen vaksin, tentunya Korea Selatan juga menghadapi beberapa tantangan dalam diplomasi kesehatan diharapkan Indonesia yang telah melakukan diplomasi bilateral, dapat memberikan solusi untuk kemajuan kedua negara (Livana *et al.*, 2020) :

1. Pembagian Pasokan

Korea Selatan harus memutuskan berapa banyak pasokan vaksin yang akan dialokasikan untuk kebutuhan domestik dan berapa banyak yang akan diekspor ke negara

lain. Kebutuhan untuk memastikan kebutuhan vaksin dalam negeri terpenuhi dan pada saat yang sama membantu negara lain bisa menjadi dilema.

2. Kualitas dan Keamanan

Sebagai produsen, Korea Selatan harus menjamin kualitas dan keamanan vaksin yang diproduksi agar memenuhi standar internasional. Jika ada masalah atau insiden keamanan terkait vaksin yang diproduksi, hal ini bisa berdampak negatif pada hubungan diplomatik dan citra Korea Selatan di mata negara konsumen.

3. Ketergantungan Pada Bahan Baku

Produksi vaksin memerlukan bahan baku tertentu, yang mungkin harus diimpor dari negara lain. Korea Selatan harus menghadapi tantangan jika ada hambatan dalam pasokan bahan baku tersebut, yang bisa mempengaruhi kapasitas produksi vaksin.

Dalam mengatasi tantangan diplomasi kesehatan ini, kerjasama yang kuat antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan serta transparansi dalam proses negosiasi akan menjadi kunci penting. Diplomasi yang efektif, dialog terbuka, dan kesepakatan yang saling menguntungkan dapat membantu mengatasi tantangan dan memastikan pemenuhan vaksin yang lebih baik bagi kedua negara. Selama Pandemi COVID-19, diplomasi kesehatan yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan telah memberikan sejumlah manfaat bagi kedua negara dan masyarakat global. Beberapa manfaat utamanya meliputi (Shiyammurti, Saputri and Syafira, 2020), antara lainnya :

1. Akses ke Vaksin dan Perlengkapan Medis

Melalui diplomasi kesehatan, Indonesia dan Korea Selatan dapat menjalin kerjasama untuk memperoleh akses yang lebih baik ke vaksin COVID-19 dan perlengkapan medis yang penting, seperti alat tes, ventilator, dan perlengkapan pelindung diri. Hal ini membantu meningkatkan kemampuan negara-negara tersebut dalam menangani pandemi dan melindungi warganya.

2. Pertukaran Informasi dan Pengalaman

Diplomasi kesehatan memungkinkan Indonesia dan Korea Selatan untuk berbagi informasi, data, dan pengalaman terkait penanganan COVID-19. Pertukaran ini dapat

membantu keduanya dalam mengidentifikasi strategi terbaik, kebijakan efektif, dan praktik terbaik dalam menangani krisis kesehatan ini.

3. Bantuan Kemanusiaan

Diplomasi kesehatan memungkinkan Indonesia dan Korea Selatan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara lain yang membutuhkan. Baik berupa bantuan medis, logistik, atau dukungan teknis, bantuan ini membantu memperkuat solidaritas internasional dan memberikan bantuan langsung kepada negara-negara yang sedang menghadapi tekanan sistem kesehatan mereka.

4. Pengembangan Kerjasama Riset dan Pengembangan Vaksin

Diplomasi kesehatan juga dapat mendorong kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam riset dan pengembangan vaksin COVID-19. Melalui kemitraan ini, kedua negara dapat berkontribusi pada penelitian dan pengembangan vaksin, obat-obatan, dan terapi baru untuk mengatasi pandemi secara global.

5. Meningkatkan Citra dan Reputasi

Partisipasi aktif dalam diplomasi kesehatan selama pandemi dapat meningkatkan citra dan reputasi Indonesia dan Korea Selatan di mata masyarakat internasional. Ketika negara-negara menunjukkan solidaritas dan kerjasama dalam menangani krisis kesehatan global, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan penghargaan dari negara-negara lain.

6. Penguatan Hubungan Bilateral

Diplomasi kesehatan juga dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan. Ketika kedua negara bekerja bersama untuk mengatasi pandemi, hal ini dapat meningkatkan saling pengertian dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat keduanya.

7. Kolaborasi Internasional

Diplomasi kesehatan selama pandemi COVID-19 juga memperkuat kolaborasi internasional dalam menangani krisis kesehatan. Melalui forum dan inisiatif global, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau G20, Indonesia dan Korea Selatan dapat bekerja sama dengan negara-negara lain dalam menghadapi tantangan bersama dan mencari solusi kolektif.

Secara keseluruhan, diplomasi kesehatan yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan selama Pandemi COVID-19 memberikan manfaat yang luas bagi keduanya dan

masyarakat global. Kerjasama, solidaritas, dan kolaborasi internasional dalam menghadapi pandemi menjadi kunci penting untuk mengatasi krisis kesehatan ini secara efektif.